

# ANALISIS GERAKAN PETISI CIVITAS AKADEMIKA DALAM TEORI *SPIRAL OF SILENCE*

<sup>1\*\*</sup>Arie Purnama, <sup>2</sup>Wawan Hernawan

<sup>1</sup>ariepurnama@ubl.ac.id, <sup>2</sup>wawan.hernawan@ubl.ac.id

<sup>1,2</sup>Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung

\*\*Corresponding Author

---

## Abstrak

Tulisan ini membahas gerakan petisi yang dilakukan oleh civitas akademika dari berbagai kampus di Indonesia pada awal tahun 2024, sebagai tanggapan terhadap kondisi politik dan demokrasi yang dianggap memprihatinkan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma kritis, tulisan ini mengkaji fenomena gerakan petisi tersebut dan hubungannya dengan teori Spiral of Silence dalam bidang komunikasi. Gerakan petisi tersebut mencerminkan kekhawatiran serius terhadap kondisi politik dan demokrasi di Indonesia. Selain itu, terdapat kritik terhadap pemerintah dan penyelenggara pemilu, penekanan pada etika dan nilai-nilai demokrasi, serta keprihatinan atas pelanggaran etika. Dalam konteks teori Spiral of Silence, gerakan petisi ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk memutus spiral keheningan yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Civitas akademika secara kolektif menyuarakan keprihatinan mereka, menunjukkan bahwa suara minoritas tetap memiliki kekuatan dan relevansi dalam dinamika demokrasi.

**kata kunci:** civitas akademika, teori *spiral of silence*, suara minoritas

---

## PENDAHULUAN

Beberapa waktu yang lalu, di akhir bulan Januari 2024, beberapa guru besar dan civitas akademika menandatangani petisi terhadap presiden Jokowi. Mereka bersal dari berbagai universitas di Indonesia baik perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta, seperti Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dan banyak Universitas lainnya. Kurang lebih hampir 30 (tiga puluh) Universitas yang menyatakan petisi tersebut.

Gelombang petisi dari civitas akademika kian kian massive menyuarakan teguran terhadap pemerintahan yang menyatakan keprihatinan atas pelanggaran etika yang

dilakukan oleh penyelenggara negara, keberpihakan aparat pemerintah kepada calon tertentu, munculnya dugaan intimidasi aparat kepada konsetan lain serta menggunakan anggaran negara dalam bentuk bantuan sosial untuk pansos (panjat sosial). Penyebab gerakan Petisi ini dilatarbelakangi oleh tindakan menyimpang Presiden Joko Widodo. Mulai dari cacatnya putusan MK nomer 90, yang melanggengkan Gibran Rakabuming menjadi calon wakil Presiden, politisasi bansos, hingga keberpihakan Jokowi terhadap Prabowo.

Presiden Jokowi menyatakan dirinya akan “cawe-cawe” atau terlibat ambil bagian dalam kontestasi Pemilu 2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di Pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak

melaksanakan kampanye. Akan tetapi Pasal tersebut dijelaskan lebih rinci pada pasal selanjutnya, sampai dengan Pasal 305. Yang boleh berkampanye adalah presiden petahana yang ikut dalam kontestasi, sehingga wajib melakukan cuti. Kemudian terdaftar dalam team sukses di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baik presiden ataupun pejabat negara wajib untuk cuti serta tidak menggunakan fasilitas Negara, baik fasilitas pendukung sampai anggaran Negara.

Alih-alih merespon dengan tangan terbuka, malahan pemerintah melalui perwakilannya mengatakan gerakan ini merupakan strategi politik partisan untuk politik electoral. Respons pemerintah terhadap gerakan ini dianggap sebagai upaya untuk menekan kebebasan akademik. Para guru besar dan civitas akademika menginginkan Pemilu yang Jujur dan adil. Menurut Dedi Kurnia Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO), kritik dan keresahan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta bisa mengikis tingkat kepercayaan publik. Bukan tidak mungkin akan lahirkan gerakan mahasiswa ([news.batampost.co.id](http://news.batampost.co.id). 05/04/24). Perilaku tersebut menimbulkan dampak pada skeptisisme sosial Penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal ini mencerminkan kondisi sejarah di mana para Akademisi, yang sebelumnya fokus pada pendidikan, terlibat dalam perjuangan untuk mempertahankan nilai-nilai reformasi dan menolak kembalinya rezim Orde Baru.

### **Teori *Spiral of Silence***

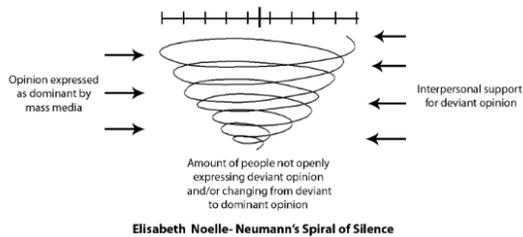
Teori "*Spiral of Silence*" atau Spiral Keheningan dalam bidang komunikasi pertama kali diperkenalkan oleh Elisabeth N. Neumann pada tahun 1970-an. Teori ini

berkembang dari pengalaman Neumann sebagai wartawan selama masa kekuasaan Nazi di mana pendapat minoritas yang berbeda dengan pemerintah ditindas, sehingga menimbulkan ketakutan dalam mengemukakan pendapat. Istilah "pendapat minoritas yang terdiam" mengacu pada pendapat yang terpinggirkan dan tidak disuarakan dalam masyarakat. Teori ini berkaitan dengan opini public, bagaimana minoritas mengungkapkan opininya terhadap sebuah kejadian. Biasa ada dua macam perlakuan minoritas terhadap sebuah kejadian, diam atau ikut mayoritas. Menurut Noelle-Neumann terdapat beberapa asumsi dari *spiral of silence theory* antara lain (Noelle-Neumann, 1984):

1. Kekuatan masyarakat terletak pada ancaman isolasi terhadap individu-individu yang melanggar norma-norma, dengan perasaan takut terhadap isolasi memiliki pengaruh yang besar. Masyarakat memiliki kekuasaan untuk memaksa kesepakatan nilai-nilai yang dipegang bersama melalui ancaman isolasi terhadap yang tidak sependapat. Struktur sosial bergantung pada persetujuan kolektif terhadap nilai-nilai tersebut, dengan opini publik memainkan peran penting dalam menentukan penerimaan nilai-nilai tersebut. Kesepakatan dalam nilai-nilai mengurangi ketakutan akan isolasi, sementara perbedaan nilai dapat memicu ketakutan tersebut.
2. Perasaan takut akan isolasi menyebabkan individu-individu untuk setiap saat mencoba menilai iklim opini. Masyarakat secara terus-

menerus menilai iklim dari opini publik. Noelle Neumann berpendapat bahwa individu menerima informasi mengenai opini publik berasal dari dua sumber yaitu observasi personal dan media.

3. Perilaku publik dipengaruhi oleh penilaian tentang opini publik. Individu akan berbicara tentang topik jika merasa didukung, tetapi akan diam jika merasa tidak didukung. Teori Noelle-Neumann menekankan bahwa kekuatan sinyal dari pendukung dan kelemahan dari kelompok lain dapat mendorong spiral opini. Secara keseluruhan, orang cenderung bertindak sesuai dengan persepsi tentang pandangan orang lain.



Gambar 1. Teori Spiral of silence. Sumber (Noelle-Neumann, 1984)

Kajian Noelle-Neumann ini menitik beratkan peran opini dalam interaksi sosial. Opini publik sebagai sebuah isu kontroversial akan berkembang pesat saat dikemukakan melalui media massa. Ini berarti opini publik orang-orang juga dibentuk, disusun dan dikurangi oleh peran media massa. Jadi ada kaitan erat antara opini dengan media massa. Opini yang berkembang dalam kelompok mayoritas dan kecenderungan. Prinsip pada teori spiral keheningan ini bisa diilustrasikan dalam kehidupan tiap hari, dimana tiap komunikasi

personal serta komunikasi yang memakai media massa. Media massa mempunyai guna memberitahukan opini public yang menciptakan pemikiran ataupun komentar yang dominan, biasanya orang dalam mengemukakan sesuatu pemikiran tergantung pada pemikiran lain yang lebih dominan. Media pada porsinya hendak cenderung pada menceritakan pemikiran yang terungkap serta karenanya spiral keheningan (Morissan, 2015)

Sehingga gerakan petisi ini dapat di analisa dengan meminjam Teori "*spiral of silence*" yang mengemukakan bahwa individu mendasarkan pembacaan opini publik mereka pada serangkaian isyarat di lingkungan mereka, mulai dari surat kabar dan media massa hingga membentuk opini. Penelitian ini fokus untuk menganalisis gerakan petisi dari civitas akademika dan para Guru Besar dari berbagai universitas yang menyuarakan kekhawatiran terhadap pelanggaran etika oleh penyelenggara negara, keberpihakan aparat pemerintah kepada calon tertentu, dugaan intimidasi aparat terhadap kontestan lain, dan penggunaan anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Situasi spiral keheningan ini juga terjadi di Indonesia, terutama menjelang jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto. Banyak pendapat publik yang tidak terungkap karena bertentangan dengan pandangan mayoritas.

## METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma kritis. Penelitian kualitatif deskriptif berusaha menggambarkan secara rinci dan akurat sebuah fenomena yang diteliti untuk

menjawab bagaimana fenomena tersebut terjadi dan siapa yang terlibat (Bungin, 2006). Objek penelitian adalah gerakan petisi civitas akademika yang dilakukan oleh para Guru Besar sejumlah kampus Swasta dan Negeri. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi pernyataan resmi melalui media masa yang dapat putar ulang melalui kanal media di Youtube sejak akhir bulan Januari 2024 sampai pemilu pada 14 Februari 2024. Serta kajian pustaka artikel, jurnal, yang bersifat online yang memuat kajian relevan terkait penelitian ini.

**PEMBAHASAN**

Gelombang gerakan keresahan dan tuntutan civitas akademika kian meluas setelah di awaki pembacaan petisi oleh civitas akademika UGM pada 31 Januari 2024. Tuntutan utama adalah civitas akademika UGM, meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden Joko Widodo, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial (Akurat, 2024). Adapun daftar gerakan petisi tersebut sebagai berikut;

Tabel 1.1. Nama kampus,waktu, dan tuntutan. Sumber (peneliti)

No	Nama Kampus	Waktu Petisi	Jenis Tuntutan
1	Universitas Gajah Mada	31 Januari 2024	Kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial
2	Universitas Islam Indonesia	1 Februari 2024	Mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan

			institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden. Indonesia darurat Kewarganegaran.
3	Universitas Khairun Ternate	1 Februari 2024	kita butuhkan Presiden yang bisa berdiri di semua anak bangsa
4	Universitas Andalas Sumbar	2 Februari 2024	penyelamatan bangsa adalah sebagai bentuk dari keprihatinan terhadap kondisi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja.
5	UIN Sunan Kalijaga	2 Februari 2024	Mendesak Presiden RI sebagai kepala negara untuk menjadi teladan etik bagi semua aparat di bawahnya dalam menjaga netralitas dan menjamin proses politik
6	UNHAS Makassar	2 Februari 2024	Senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi.
7	Universitas Lambung Mangkurat	2 Februari 2024	Meminta proses demokrasi dilaksanakan sungguh-sungguh berdasarkan Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku
8	Universitas Atma Jaya	2 Februari 2024	Pemilu seharusnya menjadi wadah penerapan nilai-nilai kejujuran, keadilan, kedamaian, dan martabat. Untuk itu, peserta pemilu harus dapat menjunjung tinggi komitmen pada demokrasi dan keadilan
9	Universitas Indonesia	2 Februari 2024	Etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan dan merampas akses keadilan
10	Universitas Muhammadiyah B	2 Februari 2024	Mendesak penyelenggara pemilu dapat melaksanakan tugas sesuai dengan sumpah jabatan yang diucapkan sehingga tercipta pemilu yang jujur dan adil.
11	Universitas Khairu Ternate	2 Februari 2024	Menuntut kepada aparat hukum agar memberikan jaminan kepada masyarakat indonesia untuk menggunakan hak pilihnya tanpa intimidasi, selain itu juga petisi tersebut

			menyebutkan agar seluruh penyelenggara pemilu komitmet bersikap netral
12	UMY	3 Februari 2024	Mendesak Presiden RI menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai penyelenggara negara untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2024 yang jujur dan adil.
13	UNPAD Bandung	3 Februari 2024	Praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elit akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, yang menjadi tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
14	IPB	3 Februari 2024	Mendorong proses suksesi kepemimpinan nasional melalui pemilihan umum (pemilu) berlangsung tertib, aman dan damai.
15	Universitas Islam Malang	3 Februari 2024	Mengutuk Praktek-praktek oligarki yang mengabaikan tentang prinsip kejujuran di dalam praktek Pemilu 2024
16	UIN Syarif Hidayatulah Ciputat	5 Februari 2024	Mendesak penyelenggara Pemilu 2024 untuk berkerja secara profesional dengan memegang prinsip independen, transparan, adil, dan jujur. Termasuk Presiden dan seluruh jajarannya.
17	Universitas Ahmad Dahlan	5 Februari 2024	Menuntut Presiden dan seluruh penyelenggara negara agar menjaga dan menegakkan netralitas, tidak menggunakan fasilitas negara serta tidak mempolitisasi segala bentuk bantuan pemerintah yang dikaitkan dengan kontestasi Pemilu tahun 2024.
18	UNAIR Surabaya	5 Februari 2024	Meminta Presiden Jokowi tidak menggunakan fasilitas negara dan menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu, serta bepihak pada politik elektoral.
19	Universitas Pendidikan Indonesia	5 Februari 2024	Menuntut Presiden dan pejabat lainnya tidak menyalahgunakan kekuasaan dan

			menggunakan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral dan politik praktis. Mengedepankan etika dan moral.
20	UMS	5 Februari 2024	penyalahgunaan pranata hukum lewat Mahkamah Konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan yang berwatak nepotis dan oligarkis yang semakin diperburuk oleh praktik politik dari Presiden yang tidak netral dalam kontestasi Pemilihan umum yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan secara massif
21	Universitas Brawijaya	6 Februari 2024	Mengimbau pemerintah dan aparat penegak hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat, dan bebas dari kepentingan politik praktis.
22	Universitas Lampung	7 Februari 2024	Menuntut pemerintah netral dalam pemilu 2024 serta, seruan keprihatinan atas pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa civitas akademika dari berbagai kampus di Indonesia memiliki keprihatinan yang sama terhadap kondisi politik dan demokrasi di negara mereka. Beberapa temuan penting dari petisi ini adalah:

- Tuntutan Pemulihan Demokrasi: Tuntutan utama dari petisi ini adalah pemulihan koridor demokrasi dan pendedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Ini menunjukkan bahwa ada kekhawatiran bahwa demokrasi di Indonesia sedang terancam atau terganggu.
- Kritik terhadap Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu: Ada kritik

yang kuat terhadap pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo, serta penyelenggara pemilu, terutama dalam konteks netralitas, penggunaan fasilitas negara, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidaknetralan dalam proses pemilihan.

- Penekanan pada Etika dan Nilai-Nilai Demokrasi: Banyak dari petisi ini menekankan pentingnya etika dan nilai-nilai demokrasi, termasuk netralitas, kejujuran, keadilan, dan penghargaan terhadap prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945.
- Pentingnya Pelaksanaan Pemilu yang Jujur dan Adil: Kampus-kampus juga menekankan perlunya pemilu yang jujur dan adil, serta menuntut penyelenggara pemilu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan sumpah jabatan yang diucapkan.
- Keprihatinan atas Pelanggaran Etika: Beberapa petisi mengekspresikan keprihatinan atas pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara negara, termasuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan, tidak tebang pilih, dan kebebasan berpendapat (Kumaran, 4 Februari 2024).

Dalam konteks petisi yang disebutkan, terdapat hubungan yang erat antara teori *spiral of silence* dan tuntutan yang diajukan oleh civitas akademika. Teori *spiral of silence* menyatakan bahwa individu cenderung menahan diri untuk menyuarakan pendapat yang dianggap sebagai minoritas karena takut akan isolasi sosial.

### **Petisi civitas akademika dalam kacamata teori *spiral of silence***

Dalam konteks Pemilu 2024, kehadiran civitas akademika menjadi semakin signifikan dalam menyuarakan situasi politik teraktual. Mereka turun ke jalan dengan membaca petisi dan menyampaikan pernyataan sikap, menciptakan gelombang kesadaran kritis yang meluas.

Situasi ini dipicu oleh carut marut dinamika Pemilu 2024 yang dipenuhi polemik dan intrik politik, terutama terkait upaya memenangkan salah satu paslon calon presiden dan calon wakil presiden. Beberapa peristiwa, seperti putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Gibran Rakabuming Raka dan keputusan Presiden Jokowi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023, semakin mempertegas penyimpangan yang terjadi dalam proses pemilu.

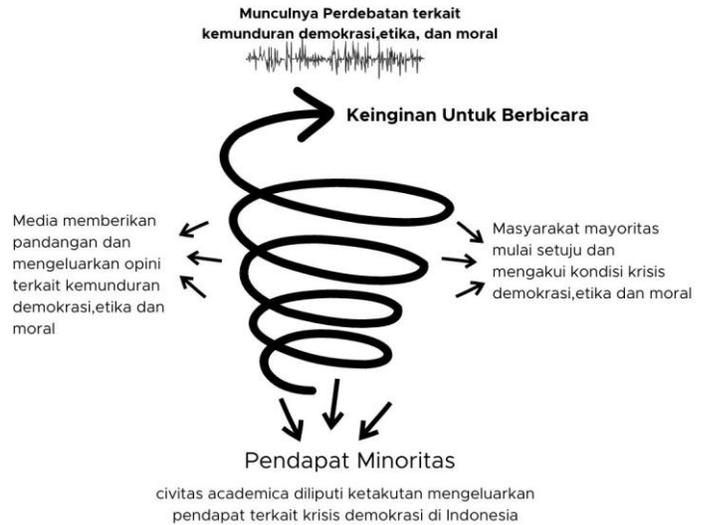
Pernyataan terang-terangan Presiden Jokowi yang memihak salah satu paslon menimbulkan kontroversi, terutama karena disampaikan di hadapan prajurit TNI dan didampingi oleh calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, serta anak sulungnya yang juga tengah berkompetisi dalam Pemilu 2024, Gibran Rakabuming Raka (Kumaran, 8 Februari 2024). Hal ini membuka kemungkinan penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pemilu yang jujur, adil, bebas, dan demokratis. Dengan demikian, situasi ini menyoroti pentingnya menjaga integritas dan netralitas dalam proses pemilu, serta perlunya partisipasi aktif civitas akademika dalam mengawasi dan menyuarakan kepentingan

masyarakat demi terciptanya pemilu yang bersih dan demokratis.

Petisi ini menyoroti kekhawatiran terhadap terancamnya demokrasi di Indonesia. Dalam kerangka teori *spiral of silence*, pemulihan demokrasi menjadi upaya untuk memutus spiral keheningan dengan mengorganisir suara minoritas yang mengkhawatirkan keadaan demokrasi. Kritik yang diajukan terhadap pemerintah dan penyelenggara pemilu mencerminkan dorongan untuk memutus spiral keheningan. Petisi tersebut menjadi wadah bagi individu-individu yang merasa takut untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan atau praktik yang dianggap tidak adil.

Penekanan pada etika dan nilai-nilai demokrasi, seperti netralitas, kejujuran, dan keadilan, merupakan upaya untuk memperkuat suara minoritas yang peduli akan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam teori *spiral of silence*, penekanan ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk memutuskan keheningan dengan menyuarakan nilai-nilai yang dianggap penting. Perlunya pemilu yang jujur dan adil juga dapat dilihat sebagai upaya untuk memutus spiral keheningan dalam hal pelanggaran atau kecurangan dalam proses pemilihan. Tuntutan ini mencerminkan keberanian untuk menyuarakan kekhawatiran akan proses pemilu yang tidak adil. Ekspresi keprihatinan terhadap pelanggaran etika oleh penyelenggara negara juga dapat dipahami sebagai upaya untuk memutus spiral keheningan. Individu-individu yang merasa takut untuk menyuarakan keprihatinan mereka terhadap pelanggaran etika dapat menemukan keberanian untuk melakukannya

melalui partisipasi dalam petisi ini. Berikut adalah gambaran gelombang petisi dalam teori *Spiral of Silence*;



Gambar.2 Teori Spiral of silence menurut Analisa. Sumber (peneliti)

Dengan demikian, petisi ini mencerminkan dinamika teori *spiral of silence* di mana individu-individu merasa lebih aman dan didukung untuk menyuarakan pandangan atau kekhawatiran mereka melalui partisipasi dalam kelompok yang memiliki tujuan atau kekhawatiran serupa. Ini juga mencerminkan upaya untuk memutus spiral keheningan dan memberikan suara bagi kelompok minoritas yang peduli akan demokrasi dan prinsip-prinsip etika.

## PENUTUP

Secara keseluruhan, petisi yang diajukan oleh civitas akademika dari berbagai kampus di Indonesia mencerminkan kekhawatiran serius terhadap kondisi politik dan demokrasi di negara tersebut. Temuan penting dari petisi ini, sebagaimana diuraikan, secara erat terkait dengan teori *spiral of silence*, di mana individu cenderung menahan diri

menyuarakan pendapat minoritas karena takut akan isolasi sosial.

Kesimpulannya, petisi ini dapat dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap spiral keheningan yang mungkin terjadi dalam masyarakat. civitas akademika secara kolektif menyuarakan keprihatinan mereka terhadap pemulihan demokrasi, kritik terhadap pemerintah dan penyelenggara pemilu, penekanan pada etika dan nilai-nilai demokrasi, perlunya pemilu yang jujur, serta keprihatinan atas pelanggaran etika.

Dalam konteks teori *spiral of silence*, petisi ini mengindikasikan bahwa civitas akademika mencoba memutuskan keheningan yang mungkin terjadi dalam masyarakat dengan mengorganisir diri dan memberikan suara terhadap isu-isu yang dianggap penting. Petisi tersebut mencerminkan semangat perlawanan terhadap tekanan sosial untuk diam dan memberikan contoh bahwa suara minoritas tetap memiliki kekuatan dan relevansi dalam dinamika demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akurat, M. R. (2024, Februari 5). *Daftar 30 Universitas Keluarkan Petisi Kritik Presiden Jokowi Terkait Kebebasan Berdemokrasi Jelang Pilpres 2024, Kampusmu Salah Satunya?* - Akurat Jakarta - Halaman 2. Daftar 30 Universitas Keluarkan Petisi Kritik Presiden Jokowi Terkait Kebebasan Berdemokrasi Jelang Pilpres 2024, Kampusmu Salah Satunya? - Akurat Jakarta - Halaman 2. <https://jakarta.akurat.co/poljak/1314087218/daftar-30-universitas-keluarkan-petisi-kritik-presiden-jokowi-terkait-kebebasan-berdemokrasi-jelang-pilpres-2024-kampusmu-salah-satunya>
- Bungin, B. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. <https://books.google.co.id/books?id=LzmaAQAACAAJ>
- Cobis, M. Y., & Rusadi, U. (2023). Analisis Teori Spiral of Silence pada Persepsi Publik tentang Citra Polisi oleh Media Massa. *Journal of Political Issues*, 4(2), 99–107. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.92>
- Eriyanto, E. (2017). Teori Spiral Kesunyian dan Negara Transisi Demokrasi: Sebuah Pengujian di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.7454/jki.v1i1.7808>
- Gerakan Petisi dalam Teori Komunikasi Spiral of Silence*. (t.t.). kumparan. Diambil 3 Maret 2024, dari <https://kumparan.com/arie-cesc/gerakan-petisi-dalam-teori-komunikasi-spiral-of-silence-227oTx0DdX1>
- Kepercayaan Terhadap Jokowi Bisa Tergerus Dampak Gerakan civitas akademika dari Berbagai Kampus—News*. (2024, Februari 5). <https://news.batampos.co.id/kepercayaan-terhadap-jokowi-bisa-tergerus-dampak-gerakan-civitas-akademika-dari-berbagai-kampus/>
- Media, K. C. (2024, Februari 4). *Gelombang Kritik Para Guru Besar soal Pemilu 2024 dan Tanda Tanya Sikap Jokowi... Halaman all*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/04/08381211/gelombang-kritik-para-guru-besar-soal-pemilu-2024-dan-tanda-tanya-sikap>
- Morissan. (2015). *Teori Komunikasi Individu Hingga Masa*. Prenada Media.
- Mulyana, D. (2010). *Ilmu komunikasi suatu pengantar* (Cetakan keempatbelas). Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Noelle-Neumann, E. (1984). *The spiral of silence: Public opinion, our social skin*. University of Chicago Press.
- Rahmawati, R., Wibowo, B. Y., & Musahwi, M. (2018). Spiral of silence theory dalam

Pemilihan Kepala Daerah. *Hermeneutika : Jurnal Hermeneutika*, 4(1), 13. <https://doi.org/10.30870/hermeneutika.v4i1.4819>

*Runtuhnya Etika dan Moral dalam Politik Gentong Babi Jelang Pemilu 2024.* (t.t.). kumparan. Diambil 3 Maret 2024, dari <https://kumparan.com/arie-cesc/runtuhnya-etika-dan-moral-dalam-politik-gentong-babi-jelang-pemilu-2024-225ZCiw4i3J>  
civitas akademika Mengawal Perjalanan Bangsa. (2024, Februari 11). *Kompaspedia*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sivitas-akademika-mengawal-perjalanan-bangsa>